



Warga Non-KMS Jangan Khawatir Pilih Sekolah Swasta

Sebab Ada Anggaran Rp 1 Miliar untuk Siswa Tidak Mampu

JOGJA, Radar Jogja - Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Suryani minta masyarakat tak khawatir mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Terutama warga miskin. Sebab pemerintah telah mengupayakan bantuan terhadap siswa yang bersekolah swasta.

Kemarin (31/1), Suryani menerima audiensi dengan warga yang melakukan demonstrasi di gedung DPRD Kota Jogja. Perhatian dalam audiensi berpusat pada warga yang tidak lagi jadi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). Padahal, KMS jadi salah satu jalan bagi warga untuk dapat loloskan anaknya masuk sekolah negeri.

Suryani kemudian menjabarkan, jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pelajar beragam. Mulai dari zonasi, bibit unggul, prestasi luar kota, mutasi orang tua, afirmasi disabilitas, dan afirmasi KMS. "Jangan semua masuk kuota KMS yang cuma 11 persen. Kami ingin menolong anak berprestasi juga yang non-KMS," cetusnya.



ADA BANTUAN: Pemkot Jogja telah menganggarkan Rp 1 miliar untuk masyarakat miskin yang bersekolah di sekolah swasta mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak memegang kartu menuju sejahtera tak perlu khawatir memilih sekolah swasta.

Politisi PDIP ini pun menjelaskan, ingin mendorong pertumbuhan sekolah swasta di Kota Jogja. Di samping memberi kesempatan anak berprestasi untuk mengenyam sekolah negeri.

"Kalau kami buka sekolah negeri, swasta yo tutup. Itu keseimbangan dalam pendidikan," papar Suryani.

Selanjutnya diungkap, pemerintah melalui Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja telah menganggarkan Rp 1 miliar. Khusus untuk membantu tunggakan SPP siswa tidak mampu di sekolah swasta. Mulai dari jenjang SD, SMP, dan

SMA. "Semua boleh menerima. Tapi harus disurvei," lontarnya. Dipaparkan pula, Disdikpora memberi bantuan bagi ijazah tertinggal bagi siswa di sekolah swasta. "Menganggarkan Bosda

swasta. Tujuannya untuk meringankan biaya siswa yang sekolah di swasta," tegasnya.

Selain itu, Disdikpora pun disebut Suryani punya program Kartu Jogja Berprestasi (KJB). Melalui bantuan ini, siswa dapat membeli perlengkapan sekolah. Mulai dari buku sampai seragam di toko yang telah ditunjuk.

Yogi Prasetyo, Ketua RW 09 Wirogunan, Mergangsan, Kota Jogja masih merasa belum puas dengan solusi yang ditawarkan oleh Suryani. Kaitannya dengan menyekolahkan anak di sekolah swasta. Kendati ada bantuan yang bisa diakses. Dan hanya diperuntukkan bagi siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta. "Betul (tebang pilih, Red), laporan beberapa warga yang betul membutuhkan tapi tidak mendapat KMS. Walaupun kalau syarat tidak ada yang memenuhi di Kota Jogja. Tapi untuk pendidikan, sangat tebang pilih dan merugikan masyarakat," keluhnya.

Argo, Ketua RW 07 turut melontarkan tanggapan. Dia menyebut, pemilik KMS tetap semestinya dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Kendati nilai rapornya kecil. "Jadi pencabutan berpengaruh pada pencarian sekolah. Karena dengan KMS, terbanut (diterima di sekolah negeri, Red) kalau nilainya kecil," sebutnya. **(fat/eno/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005